

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Reformasi merupakan proses awal perubahan sistem politik di Indonesia. Depolitisasi politik dilakukan pada masa pemerintahan yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Berakhirnya masa pemerintahan tersebut pada 21 Mei 1998, Indonesia memasuki masa transisi menuju reformasi. Harapan akan keberadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih terbuka serta gagasan reformasi merupakan simbol era pencerahan, setidaknya telah memberikan sinyal optimisme dan dinilai mampu membawa banyak dampak perubahan. Perubahan ini diwarnai dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi di era reformasi merupakan terobosan baru bagi sistem politik Indonesia (Jati, 2012).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan penegasan tentang konsep desentralisasi. Dalam peraturan tersebut terdapat indikator bahwa pemerintahan daerah memiliki hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa desentralisasi politik merupakan pelimpahan kekuasaan dan wewenang di bidang politik, yaitu pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kewenangan politik daerah kepada pemerintahan daerah tersebut (Jati, 2012).

Dampak positif yaitu hadirnya kebebasan, keadilan yang merata, efisiensi pelayanan publik, serta masalah-masalah kenegaraan yang terjadi, pada prinsipnya desentralisasi belum berhasil secara optimal. Selain dampak positif, desentralisasi memberikan dampak negatif, yaitu memunculkan fenomena baru bagi kekuasaan politik lokal di Indonesia. Sistem desentralisasi membuka ruang gerak yang lebih luas bagi orang kuat lokal untuk merebut kekuasaan politik di daerah (Wulandari, 2012). Dampak negatif yang paling menonjol dari proses transisi ini adalah maraknya praktek oligarki yang menggurita ke tingkatan lokal sehingga tumbuh pemerintahan kekuasaan model politik dinasti (Agustino, 2011).

Desentralisasi memunculkan *local bossism* atau bos lokal. Pembahasan mengenai *local bossism* dari penelitian ini merupakan suatu kajian politik Rumpoko di arena politik lokal yang dipilih berdasarkan analisa terjadinya fenomena kekuasaan Rumpoko dalam dinamika politik Kota Batu selama hampir tiga periode. Kota Batu menjadi arena kekuasaan Eddy Rumpoko yang masa jabatannya selama dua periode 10 tahun dan dilanjutkan dengan mengangkat Dewanti Rumpoko untuk memegang kekuasaan Kota Batu yang saat ini sedang menjabat sebagai wali kota Batu (Sidel, 1999).

Dalam mengidentifikasi konsep *local bossism* oleh John Sidel, telah terjadi bagaimana *local bossism* menjalankan kekuasaannya pada pemilu di kota Batu. Terpilihnya Dewanti Rumpoko menggantikan Eddy Rumpoko sebagai wali kota pada pemilihan umum tahun 2017, hal ini tidak terlepas dari pengaruh Eddy Rumpoko dalam dinamika politik Kota Batu. Sebagai wali kota yang menduduki kekuasaan formal selama hampir tiga periode, keluarga Rumpoko juga banyak memasuki jabatan penting dalam dunia perpolitikan.

Eddy Rumpoko dipilih secara langsung oleh ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang hingga tahun 2020. Dewanti Rumpoko pada pemilu tahun 2017 juga diusung oleh PDIP, Golkar, Partai Gerindra, dan PKS, dalam konsep *local bossism* oleh Sidel, digambarkan bahwa *local bossism* biasanya muncul dan menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan legislatif. Hal ini terjadi pada negara-negara pasca jatuhnya rezim otoritarianisme (Sidel, 1999).

Penelitian ini memandang fokus konsep *local bossism* lebih besar dari lokus kajian patron-klien. Penelitian ini menjelaskan hubungan yang saling menguntungkan hanya sebagai salah satu ciri yang mendukung bagaimana praktek *local bossism* terjadi di Kota Batu. Patronase ini dilakukan oleh *local bossism* sebagai usaha untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. Patronase di Kota Batu terjadi pada saat kampanye pemilihan wali kota, Eddy Rumpoko melakukan patronase melalui politik uang dalam usaha untuk memenangkan Dewanti Rumpoko dengan cara memobilisasi aparatur desa untuk mengadakan forum pertemuan warga dengan indikasi tujuan politis mengajak warga untuk memilih

pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Batu nomor urut 2 yakni Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso (M Aminudin, 2017).

Dalam pertemuan tersebut, setiap warga yang hadir diberi uang sebesar seratus ribu dan juga mukena serta sarung dengan ajakan untuk memilih pasangan nomor urut dua. Hal tersebut dilakukan bukan hanya di satu lokasi, melainkan di enam desa berbeda (detiknews, 2017). *Local bossism* melihat pembelian suara dalam pemilihan umum sebagai salah satu ciri yang menegakkan konsepsi *local bossism*. Politik uang ini dilakukan sebagai sarana untuk kontrol kepada masyarakat dan usaha untuk memenangkan pemilu (Sidel, 1997). Pendekatan *local bossism* lebih sesuai untuk menggambarkan bagaimana sosok Eddy Rumpoko hadir sebagai kekuatan utama yang mendominasi kehidupan pemerintahan di Kota Batu beserta indikator-indikator lain untuk memonopoli sumber daya di Kota Batu.

Fenomena dinasti politik yang terjadi di Kota Batu dengan pengelolaan kekuasaan yang dilakukan Dewanti Rumpoko serta peran Eddy Rumpoko sebagai *local bossism* di Kota Batu. Dinasti politik di kota Batu dalam pengelolaan kekuasaan yang mendukung kokohnya kekuasaan dalam masyarakat yang demokratis merupakan fenomena politik yang sangat menarik untuk diteliti, dari penjelasan di atas peneliti tertarik mengambil judul Fenomena Dinasti Politik: Studi Kasus Dewanti Rumpoko Sebagai Wali Kota Batu Pada Pilkada Tahun 2017.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha melakukan observasi terhadap penelitian terdahulu terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti. Peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun, sehingga ada beberapa literatur yang relevan dengan penelitian yang ingin dilakukan sebagai penelitian terdahulu, berikut adalah 10 karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Penelitian pertama, jurnal Herri Junius Nge yang membahas mengenai “Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh yaitu, 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal;

DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dalam perundang-undangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur partai di tingkat bawah dalam penentuan calon yang diusung (Nge, 2018).

Penelitian kedua, jurnal Yunita Ratna Sari yang membahas mengenai “Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 di Jawa Timur Dari Perspektif *Rational Choice*”. Dinasti politik muncul dari pemilihan kepala daerah yang salah satunya berlangsung di Jawa Timur. Bentuk relatif dari pemilihan kepala daerah Jawa Timur yaitu anak, istri, keponakan dan adik. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa superioritas politik dinasti memudahkan kandidat memperoleh suara terbanyak, dan kandidat yang tidak memiliki hubungan darah dengan elit politik memiliki kelemahan dalam menutup ruang partisipasi (Sari, 2022).

Penelitian ketiga, penelitian Ratu Vidya Nur'aini yang membahas mengenai “Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017)”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah konsolidasi dan perluasan dinasti politik Mulyadi Jayabaya berdasarkan kekayaan materi melalui suksesi pemilu, terjalinnya hubungan yang sukses dengan jawara jaringan keluarga, dan popularitas Mulyadi Jayabaya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kehadiran dinasti politik di Lebak menciptakan perebutan kekuasaan dengan ruang persaingan politik dan ekonomi yang lebih kecil (Nur'aini, 2018).

Penelitian keempat, penelitian Uci Dewi Purwanti yang membahas mengenai “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal di Kota Bontang, Kalimantan Timur”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keluarga Andi Sofyan

Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam menjadi keluarga politik di kota Bontang. Model dinasti politik yang dimiliki Kota Bontang meliputi model Alisan dan model lintas ruang, model Alisan diwujudkan dengan memberikan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, dan model lintas ruang diwujudkan dengan keluarga. Distribusi kontrol oleh suami dan istri, ibu yang berkuasa dan anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa adanya keluarga yang masih terikat atau memiliki hubungan darah pemerintah. Dalam proposisi demokrasi bahwa semua warga negara memiliki hak pilih dan hak suara yang sama. Namun dinasti politik yang berkembang selama ini telah menggerogoti esensi demokrasi (Purwanti, 2020).

Penelitian kelima, penelitian Moh. Hafiz yang membahas mengenai “Dinasti Politik (Reproduksi Kekuasaan Dalam Dinasti Bani Husain di Desa Sera Tengah)”. Sebagai hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa dinasti Bani Husain mereproduksi kekuasaan dengan membangun jaringan kekuasaan yang dibentuk berdasarkan hubungan keluarga. Dalam pemerintahan kota, dinasti menempatkan anggota keluarga di berbagai lokasi strategis. Juga kyai, nahkoda, dan tokoh masyarakat merupakan jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti Bani Husain. Reproduksi kekuasaan dalam dinasti politik berorientasi pada keuntungan materi, menjaga harga diri, dan meneruskan tradisi keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi (Hafiz, 2018).

Penelitian keenam, penelitian Yudhi Rachman yang membahas mengenai “Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik)”. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa *trah* politik dan dinasti yang berhasil dibangun Fuad Amin selama kedua periode kepemimpinannya dilanjutkan dengan kemenangan putranya Makmun Ibnu Fuad sepuluh tahun kemudian dengan mayoritas 93,47% suara. Fuad Amin tidak langsung mengikuti pilkada setelah pesaing utamanya, KH Imam Buchori Kholil, yang juga keturunan Bani Kholil. Kemampuan suatu kelompok atau aktor politik untuk menggunakan sumber-sumber modal dan kekuatan simbolik dalam masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangkalan masih sangat efektif dalam mengelola praktik ruang patriarki. Menarik dari analisis perspektif Struktur-Agency Bourdieu,

ruang sosial dan kelompok sosial yang mendominasinya adalah produk dari perjuangan sejarah yang terus menerus diperbaharui untuk perjuangan dan kemenangan sambil menegakkan aturan kekuasaan (Rachman, 2015).

Penelitian ketujuh, penelitian Hatta Abdi Muhammad dan Dony Anggara yang membahas mengenai “Dinasti Politik pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020: Analisis Perilaku Pemilih”. Jurnal ini mengkaji bagaimana upaya elit politik untuk mempertahankan kekuasaan, dengan referensi khusus pada kasus Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Indonesia. Artikel ini menunjukkan, dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, bahwa dinasti politik dimungkinkan karena faktor ekonomi dan karakter tradisional pemilih. Kondisi sosial ekonomi yang serius yang dihadapi masyarakat, seperti pendapatan dan pendidikan yang rendah, berkontribusi pada kebangkitan dan pemeliharaan dinasti politik elit. Semua ini menghasilkan sikap pragmatis dan langsung dalam masyarakat dan perilaku pemilih yang tidak rasional, memberikan kesempatan kepada elit untuk mempertahankan dinasti politik (Hatta Abdi Muhammad, 2021).

Penelitian kedelapan, penelitian Aldilar Hira Restalina yang membahas mengenai “Oligarki Dalam Pilkada: Pertaruhan Kekuasaan Munafri Arifuddin Dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018”. Hasil penelitian menjelaskan beberapa kesimpulan. Pertama, keberhasilan seorang calon tunggal mendapatkan banyak dukungan dari partai lokal, nasional, bahkan politik, tidak terlepas dari sumber daya materi dan jaringan politik yang dimiliki keluarga. Kedua, adanya pragmatisme di mana banyak pihak ingin mencegah petahana mengambil alih kekuasaan dan partai mempertahankan eksistensinya. Ketiga, sekalipun calon tunggal berhasil mendominasi dukungan dari banyak pihak tetapi masih gagal memenangkan pilkada Kota Makassar tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya aspek internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya kekalahan (Restalina, 2020).

Penelitian kesembilan, penelitian Budhy Prianto yang membahas mengenai “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi”. Hasil penelitiannya bahwa praktek demokrasi dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata dua, yang satu sisinya memberikan hak politik untuk dapat dipilih kepada individu atau kelompok, dan pada sisi yang lain merampas hak politik untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan

kondisi penting bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di Indonesia. Tidak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan baik di pemerintahan, maupun pemerintah daerah tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam pemerintahan di daerah. Dampak dari hal ini, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah (Prianti, 2016).

Penelitian kesepuluh, penelitian Dresia Adita Tirayo yang membahas mengenai “Dinasti Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Sebuah Desa, Kabupaten Boyolali)”. Akibatnya, pertama, tidak ada larangan hukum atas kekuasaan politik yang dijalankan oleh kelompok masyarakat yang masih terikat hubungan keluarga di desa, tetapi ketua organisasi desa dan proses pemilihan desa tidak sah secara hukum. Selain itu, desa belum sepenuhnya menerima keberadaan dinasti politik di desa, dan kedua, perlu adanya pembatasan konsep hukum yang perlu dikembangkan yaitu hak politik. Kata kunci: dinasti politik, peruntukan perangkat desa, masyarakat desa (Tirayo, 2018).

Perbedaan sepuluh penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terpilihnya Dewanti Rumpoko sebagai Wali Kota Batu dengan dijabatani melalui proses oligarki serta peran *local bossism* yang membentuk dinasti politik di kota Batu tahun 2017. Penelitian ini sangat menarik dilakukan karena Dewanti Rumpoko merupakan Walikota perempuan pertama di kota Batu, yang pada dasarnya masyarakat kota Batu masih terbelah patriarkis (Chiquita, 2018). Masyarakat kota Batu masih menganggap pemimpin harus dipimpin oleh laki-laki. Fenomena ini akan menimbulkan banyak pertanyaan karena kemenangan Dewanti Rumpoko yang didukung oleh Eddy Rumpoko, yaitu mantan walikota sebelumnya yang merupakan *local bossism*, sehingga dianggap sebagai fenomena dinasti politik.

I.2 Rumusan Masalah

Atas dasar deskripsi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan kekuasaan Dewanti Rumpoko dalam mempertahankan dinasti Rumpoko pada pilkada tahun 2017 di Kota Batu?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kekuasaan Dewanti dalam mempertahankan kekuasaan Rumpoko dengan dukungan peran Eddy Rumpoko sebagai *local bossism* sehingga terbentuknya dinasti politik di Kota Batu tahun 2017.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek praktis maupun akademis diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan kelebihan penelitian ini dalam kehidupan masyarakat. Dimana manfaat secara praktis dapat menjadi solusi yang digunakan oleh masyarakat terkait masalah-masalah sosial yang berkaitan. Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Memberikan manfaat bagi peneliti sendiri guna menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu menambah pengetahuan yang dalam hal ini lebih diprioritaskan terhadap pengaruh kekuasaan dinasti politik dalam pilkada.
- c. Memberikan masukan terhadap bentuk pemerintahan politik dinasti agar sejatinya menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan manfaat penelitian dari aspek akademis yang dapat dikatakan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. Berikut manfaat akademis dari penelitian ini:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam melakukan penelitian yang serupa, dan dapat menjadi bahan banding dimasa yang akan datang.

- b. Sebagai syarat memperoleh gelar kelulusan dan sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian ini, berikut adalah sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Didalam bab ini akan membahas mengenai Teori Oligarki dan Bosisme Lokal (*Local Bossism*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, lokasi dan waktu rencana penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran merupakan serangkaian argumen terakhir serta usulan dan pendapat peneliti setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian dalam proposal skripsi.